

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing
- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aristo M.A. dkk. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)
- Chazawi, Adami. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni
- Costanzo, Mark. 2006. *Aplikasi Psikologis dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2008. *Terminology Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika

- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press
- Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang dkk. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. *Kebijakan Publik*. Malang: CV Seribu Bintang
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy (edisi 4)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, H. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Susanto, Topo. 3003. *Membumikan Syariat Islam* Jakarta: Gema Insani Press

Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____, Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

_____, Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Jurnal

Abdul Kadir. "Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Replik*. Vol. 6, No. 2, September 2018

Afrianto Sagita. "Pembalikan Beban Pembuktian sebagai Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 17, No. 1, 2017

Azmi Afifurrahman K. D. Asimin. "Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 KUHP". *Jurnal Lex Crimen Unsrat*, Vol. VII, No. 2, April 2018

Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP", *Jurnal Yuridika Unair*, Vol 32, No. 1, Januari 2017

Chant S. R. Ponglabba. "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI, No. 6, Agustus 2017

Dedi Hartono Latif. "Peran Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Umum Menurut KUHP", *Jurnal Lex Administratum Unsrat*. Vol. IV, No. 3, Maret 2016

- Dewa Ayu Made Dwi Suadnyani, "Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021
- Diska Harsandini. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217 K/PID/2014)" *Jurnal Verstek UNS*, Vol. 5, No. 2
- Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22, No. 2, Juni 2010
- Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 No. 2, Desember 2018
- Geraldo Angelo Luntungan. "Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen Unsrat*, Vol. VII, No. 5, Juli 2018
- Hadi Alamri. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Privatum Unsrat*, Vol. V, No. 1, Jan-Feb 2017
- Indra Janli Manope. "Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 2, Mar-Apr 2017
- I Gede Brahmanda Candrawiguna, Ketut Sudantra. "Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Syarat Administrasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia". *Juornal Ilmu Hukum Unud*. Vol. 08, No. 6, 2019
- Mannas, Yussi A., "Hubungan Dokter dan Pasien serta Tanggung jawab Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan", *Jurnal Cita Hukum* 6, No. 1, 2016, hlm. 163-182.
- Narulita Anggun, "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Verstek UNS*, Vol. 7, No. 1, Jan-Apr 2019
- Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah. "Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19". *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 7, No. (2), Desember 2020,
- Ronaldo Ipakit. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV, No. 2, April 2015

Rusyadi. "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan perkara Pidana" *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. V, No. 6, Tahun 2016.

Tiovary A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Privatum Unsrat*, Vol. IV, No. 4, April 2016

Sumber Online

Andira. *Polisi Ungkap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Palsu*. diakses dari <https://suarakarya.id/detail/124996/Polisi-Ungkap-Pemalsuan-Surat-Keterangan-Rapid-Test-Palsu>, pada tanggal 4 Januari 2021, pukul 20.10 WIB

Dimas Hutomo, *Hukumnya Jika Dokter Memberikan Surat Keterangan Tanpa Memeriksa Pasien*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c80ec8fd532b/hukumnya-jika-dokter-memberikan-surat-keterangan-tanpa-memeriksa-pasien/> pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 21.40 WIB

Karlina Lestari. *Prosedur Membuat Surat Keterangan Bebas Covid-19*, diakses dari <https://www.sehatq.com/artikel/prosedur-membuat-surat-keterangan-sehat-bebas-covid-19>, pada tanggal 12 Februari 2021, pukul 14.15 WIB

Promkes Kementerian Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. *Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*, diakses dari <https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>, pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 18.25 WIB

Yuli Nurhanisah dan Abdurrahman Naufal. *Surat Bebas Covid-19 Jadi Syarat Bepergian, Gimana Cara Bikinnya?*. diakses dari <http://indonesiabaik.id/infografis/surat-bebas-covid-19-jadi-syarat-bepergian-gimana-cara-bikinnya> pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 20.30 WIB